

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S. (2010). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (13th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. (2013). *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Handoko, T. H. (2008). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jpnn.com. (2014). Selama 2013, Kemnakertrans Tangani 2.861 Kasus Perselisihan Kerja. 2 November 2014. <http://www.jpnn.com/read/2014/04/15/228678/Selama-2013,Kemnakertrans-Tangani-2.861-Kasus-Perselisihan-Kerja->
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lasmana, M. S., & Setiorahardjo, B. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPH Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (edisi revisi 2009). Yogyakarta: Andi.
- Mcleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. 22 Desember 2014.
<http://modulsatker.blogspot.com/2014/02/modul-pengelolaan-administrasi-belanja.html>
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Narko. (2004). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Nasirudin, M. (2013). Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Terbaru. 27 November 2014.
<http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru>
- Nawawi, H. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

- Rivai, Veithzal. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (2nd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2011). *Accounting Information System* (12th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- RSUD. (2014). *Profil RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng*. Bantaeng: Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- Sanovra, J. R. (2014). Dokter Demo Tuntut Jasa Pelayanan, Pasien RSUD Daya Telantar 2 Jam. 3 November 2014. <http://makassar.tribunnews.com/2014/09/24/dokter-demo-tuntut-jasa-pelayanan-pasien-rsud-daya-telantar-2-jam>
- Sastrohadiwiryo, B. S. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Setiawan, H. (2013). Metode Pemotongan PPh Pasal 21 *Mixed* sebagai Alternatif Berbagi Beban. 26 November 2014. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52>
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, R. (2014). RSUD Banten Nyaris Lumpuh. 5 November 2014. <http://kabar-banten.com/news/detail/21631>
- Suryaonline. (2014). Karyawan RSUD Mardi Waluyo Demo. 3 November 2014. <http://surabaya.tribunnews.com/2014/08/06/karyawan-rsud-mardi-waluyo-demo>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). *Pengantar Akuntansi*, (Aria F., Amanugrahani, & Taufik H., Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.